

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). *Peraturan Direktur Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 170 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Gultom, A. T. S. (2012). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*. Universitas Islam Indonesia.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia* (Tarmizi (ed.); Cetakan Ke). Penerbit Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2017). *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1991). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Cipta.
- Sumarsono. (1996). *Perencanaan Lalu Lintas*. UGM.

## Jurnal

- Alkostar, D. A. (2014). Dalam Sambutan Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang. *Prosiding Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang*.
- Amin, M. C., Hamidi, W., & Ekwarso, H. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 4(1), 1106–1120.
- Anggraeny, K. D. (2017). *PENAFSIRAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM*. 2(1), 267–293.
- Gazali, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(2), 382. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.5707>
- Guntur, M. (2017). Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. *Al-Hikam*, 1(3), 64-78.
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. (2019). Transformasi dan Kesiapan POLRI untuk Peningkatan Profesionalisme Kinerja Menghadapi Tantangan dan Peluang Era Revolusi Industri. In *Paparan Kakorlantas POLRI*.
- Mahendra, A. G. (2021). Upaya Direktorat Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Penegakan Hukum bagi Pelanggar Lalu Lintas di POLDA DIY. *Advances in Police Science Research Journal*, 5(10).
- Nikmah, K., Dominikus, A., & Rodiana, A. (2019). Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 196. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2381>
- Rahmat, A. F., & Pribadi, U. (2021). Delivering Artificial Intelligence for Electronic Traffic Law Enforcement in Yogyakarta Region: Current Effort and Future Challenges. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012016>
- Saputra, P. N. (2021). Electronic Traffic Law Enforcement(Etle) Dan Permasalahannya. *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan Permasalahannya*, 13(7), 1–6. <http://berkas.dpr.go.id/>

Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 7, Issue 6, p. 462).  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>

Wasiati, C., & Razak, M. I. A. (2023). Implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Suatu Kajian Empirik di Ditlantas Polda DIY. *Widya Pranata Hukum*, 5(1), 96–110.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : ST/2664/XI/HUM.3.4.5/2022 tertanggal 18 Oktober 2022

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

### **Karya Ilmiah**

Carwika. (2020). *TINDAK PIDANA PEMALSUAN ACCOUNT MEDIA SOSIAL PUBLIC FIGUR DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK* [Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50090>

Diana, D. (2019). *Efektivitas Penerapan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam)*.

Khalid Farisi, A. (2017). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG*

*PEMASANGAN LAMPU LED ATAU HID FARIASI (MODIFIKASI LAMPU UTAMA) (Studi Pelaksanaan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Malang Kota) (Vol. 1). University of Muhammadiyah Malang.*

Labente, A. K. I. (2016). *EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE DI TINJAU DARI PASAL 50 UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN.*

Mawaddah, F. H. (2022). *IMPLEMENTASI LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*

Safera, C. J. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektrobik yang Memiliki Muatan Pornografi dan Pemerasan (Studi Kasus Perkara Nomor : 134/Pid.SusSumarsono, 'Perencanaan Lalu Lintas' (Yogyakarta: UGM, 1996)/2018/PN Kbu) [Universitas Muhammadiyah Kotabumi]. <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/112>*

## Website

Anam, S. (2017). *Legal Opinion: Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum.* Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultans. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Ananda. (2021). *Objek Penelitian: Pengertian, Macam, Prinsip, dan Cara Menentukannya.* Gramedia.Com. <https://www.gramedia.com/literasi/objek-penelitian/>

Badan Pusat Statistik. (2020). *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2020.* <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa), 2020-2022.* <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/2/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>

Irwan. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum.* <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>

- Karim, R. (2022). *Subjek Penelitian: Pengertian, Contoh dan Perbedaan dengan Objek*. Deepublishstore. <https://deepublishstore.com/pengertian-subjek-penelitian/>
- Ramadhan, D. N. S. (2018). *Pengamat : Sosialisasi Tilang Elektronik Kurang Efektif*. Www.Antaraneews.Com. <https://www.antaraneews.com/berita/749005/pengamat-sosialisasi-tilang-elektronik-kurang-efektif>
- Riyanto, A. (2018). *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?* Business Law BINUS. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>
- Shidarta. (2019). *Apa Itu Budaya Hukum?* Business Law BINUS. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>
- Yuniko, F. (2019). Pentingnya Budaya Hukum dalam Masyarakat. *Binus.Ac.Od*, 3, 1–17. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>